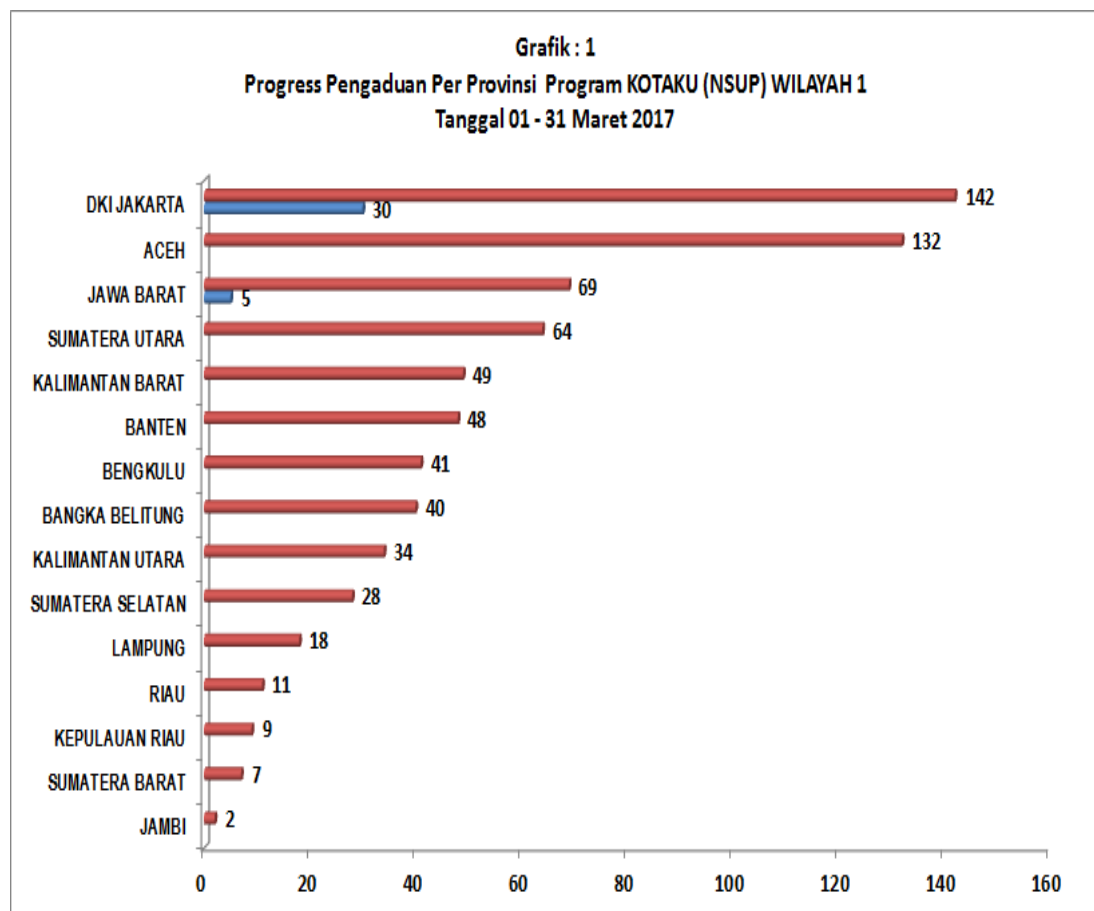


Perkembangan PPM Bulan Maret 2017

Pengelolaan Pengelolaan pengaduan pada bulan Maret 2017 telah dikelola mencapai 729 pengaduan, dengan status penanganan telah selesai 694 atau 95,2 % dan status dalam proses 35 pengaduan atau (4,8%). Pengaduan yang tertinggi pada bulan ini terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 172 pengaduan, sedangkan terendah di Provinsi Jambi sebanyak 2 pengaduan.

Grafik 1. Capaian Pengaduan Tiap Provinsi



Berdasarkan lingkupnya, pengaduan administratif sebanyak 649 pengaduan (89,0%), masih dalam status proses 5 pengaduan. Pengaduan pada lingkup keuangan terdapat 80 pengaduan (11%) dan masih dalam status proses 30 pengaduan.

Apabila dilihat dari perbandingan jumlah kelurahan dengan jumlah pengaduan yang masuk di masing-masing provinsi, maka persentase tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta, jumlah lokasi sasaran 261 kelurahan, pengaduan yang masuk 172 kasus atau 65,9%. Persentase terendah Provinsi Sumatera Barat, jumlah lokasi sasaran 357 kelurahan sementara pengaduan yang masuk hanya 7 kasus atau hanya 2%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. : Perbandingan Jumlah Pengaduan dengan Jumlah Lokasi Per Provinsi

Provinsi	Jml Kel	Jml Pengdn	Jml %	Selesai	Jml %	Proses	Jml %
SUMATERA UTARA	621	64	19,2	64	100	-	-
SUMATERA BARAT	357	7	2,0	7	100	-	-
RIAU	127	11	8,7	11	100	-	-
KEPULAUAN RIAU	109	9	8,3	9	100	-	-
JAMBI	80	2	2,5	2	100	-	-
BENGKULU	131	41	31,3	41	100	-	-
SUMATERA SELATAN	307	28	9,1	28	100	-	-
BANGKA BELITUNG	104	40	38,5	40	100	-	-
LAMPUNG	184	18	9,8	18	100	-	-
BANTEN	392	48	12,2	48	100	-	-
DKI JAKARTA	261	172	65,9	142	83	30	0,17
JAWA BARAT	1.701	74	4,4	69	93	5	0,07
KALIMANTAN BARAT	88	49	55,7	49	100	-	-
ACEH	426	132	31,0	132	100	-	-
KALIMANTAN UTARA	76	34	44,7	34	100	-	-
Total	4.343	729	16,8	694	95,2	35	4,8

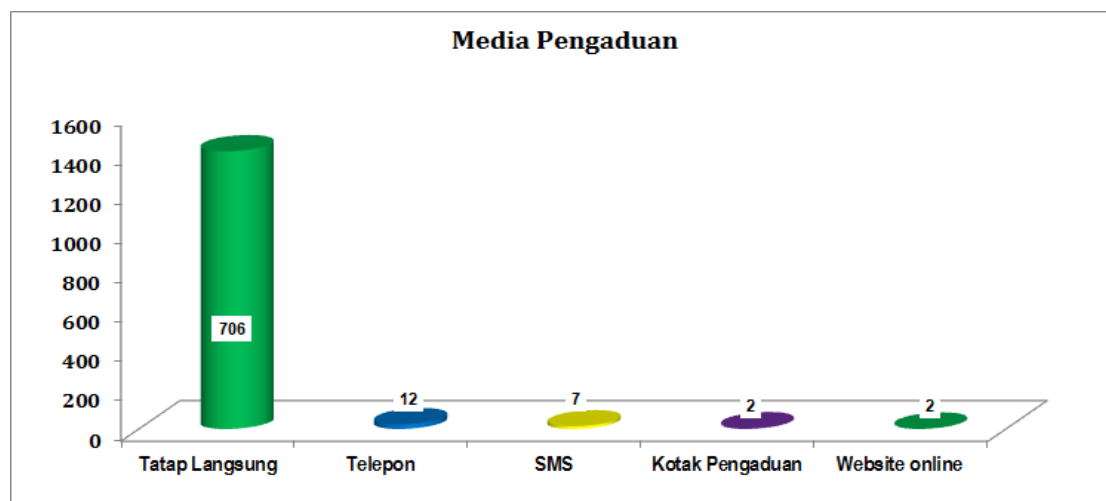
Pengaduan Berdasarkan Media

Berdasarkan media pengaduan yang paling dominan di bulan Maret 2017 ada pada media tatap langsung 706 pengaduan (96,8%). Media pengaduan terendah melalui kunjungan lapangan/supervisi facebook, Whatsapp dan email masing tidak ada pengaduan (0%).

Media tatap langsung tertinggi di DKI Jakarta sebanyak 162 pengaduan atau 22,2% dari total pengaduan. Media telepon digunakan untuk menyampaikan 6 pengaduan Sumatera Utara, DKI Jakarta 3 pengaduan, Jawa Barat 2 pengaduan dan Sumatera Barat 1 pengaduan. Media SMS digunakan menyampaikan pengaduan dari DKI Jakarta 6 pengaduan dan Riau 1 pengaduan.

Media Kotak pengaduan terdapat di Provinsi Aceh 1 pengaduan dan Provinsi Riau masing-masing 1 pengaduan. Sedangkan pengaduan online di website terdapat di DKI Jakarta dan Kalimantan Utara.

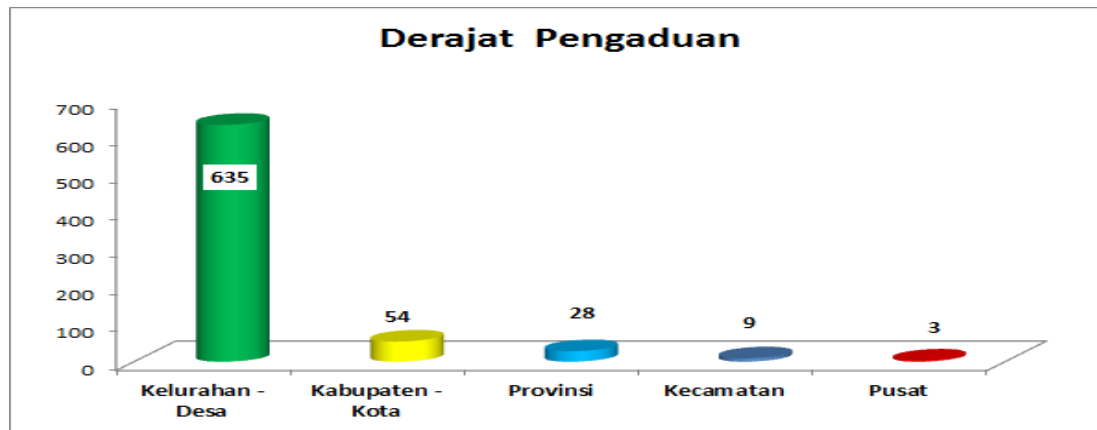
Grafik 4. Media pengaduan



Pengaduan Berdasarkan Derajat Aduan

Pengaduan berdasarkan derajat aduan bahwa kasus/ pengaduan lebih banyak pada derajat tingkat kelurahan/desa. Derajat kelurahan/ desa mencapai 635 kasus (87,1%) dan pengaduan yang terendah pada tingkat pusat 3 pengaduan (0,4%).

Grafik 3. Pengaduan Berdasarkan Derajat Aduan



Derajat pengaduan tingkat kota/kabupaten dari 54 kasus atau 7,4% terbanyak kasus terdapat di Provinsi DKI Jakarta 39 kasus, Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing 3 pengaduan, Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Lampung dan Jawa Barat masing-masing 2 pengaduan, dan Banten masing-masing 1 kasus.

Derajat pengaduan penyelesaian pada tingkat kecamatan terdapat 9 kasus atau 1,2%, terbanyak di Provinsi DKI Jakarta 8 kasus dan Bangka Belitung 1 kasus. Sedangkan derajat pengaduan tingkat provinsi terdapat 28 kasusa atau 3,8%. Terbanyak di Provinsi DKI Jakarta 21 kasus, sisanya di Provinsi Banten, Riau dan Sumatera Utara. Untuk derajat pengaduan tingkat pusat, terdapat 3 kasus atau 0,4% hanya di Provinsi Banten.

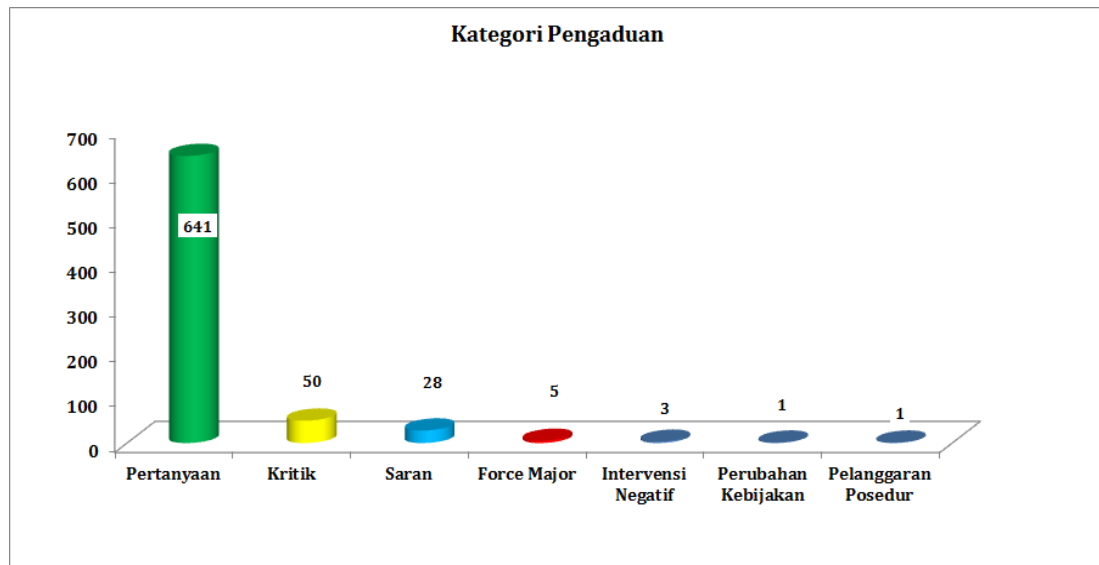
Pengaduan Berdasarkan Kategori

Berdasarkan kategori pengaduan, kategori tertinggi adaah pertanyaan dengan jumlah mencapai 641 pengaduan atau 87,9%, kritik 50 pengaduan (6,9%) dan saran 28 pengaduan (3,8%). Untuk kategori masalah terdiri dari: force major 5 pengaduan (0,7%), intervensi negatif (0,4%), serta pelanggaran prosedur dan perubahan kebijakan masing-masing 1 pengaduan (0,1), dan kategori penyalahgunaan dana tidak ada pengaduan.

Pengaduan berdasarkan kategori yang tertinggi pada kategori pertanyaan 641 pengaduan atau 87,9%. Pengaduan yang sedikit terdapat pada kategori perubahan kebijakan dan pelanggaran prosedur sebanyak 1 pengaduan (0,1%).

Kasus pengaduan kategori pertanyaan merata di seluruh provinsi, terbanyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 170 kasus dan kedua Provinsi Aceh sebanyak 131 kasus dan kasus pertanyaan paling sedikit terdapat di Provinsi Jambi sebanyak 2 kasus.

Grafik 4. Pengaduan Berdasarkan Kategori



Kategori saran tertinggi terdapat di Sumatera utara 10 kasus (35,7%) dan pengaduan yang terendah terdapat di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara tidak ada pengaduan kategori Kritik..

Kategori kritik terbanyak terdapat di Provinsi Kalimantan Utara 23 kasus (46%), dan Provinsi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera selatan, Lampung, tidak ada pengaduan kategori kritik . Sedangkan pelanggaran prosedur terdapat 1 aduan di Provinsi Jawa Barat, dan perubahan kebijakan terdapat 1 kasus Jawa Barat, Sedangkan Force Majeur hanya ada 5 kasus di Kalimantan Utara, dan intervensi negatif terdapat 3 kasus di Bangka Belitung, Jawa Barat dan Bangka Belitung.

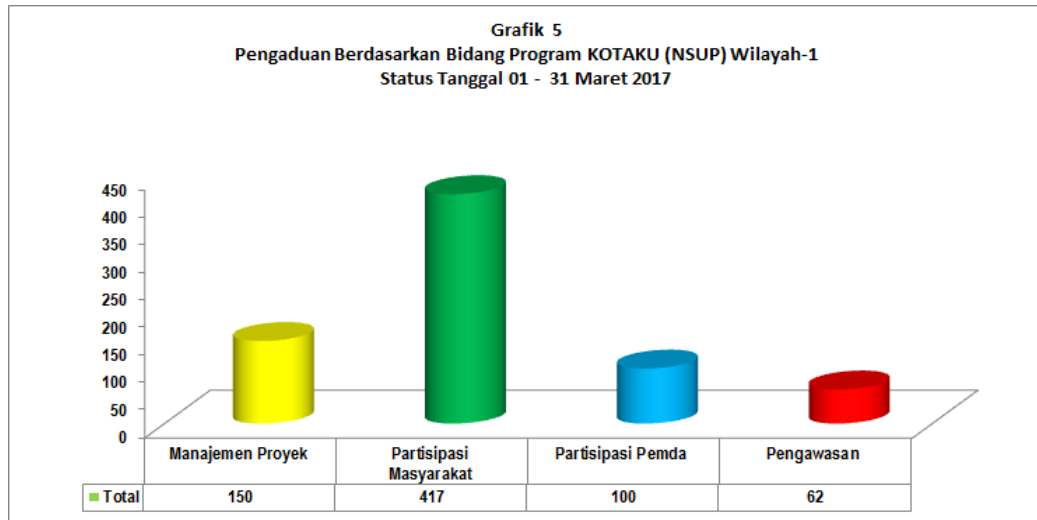
Pengaduan Berdasarkan Bidang Pelaksanaan

Berdasarkan bidang kegiatan partisipasi masyarakat lebih dominan mencapai 417 aduan (57,2%). Sedangkan bidang pelaksanaan kegiatan yang kasusnya terendah pada kategori pengawasan 62 kasus (8,5%).

Bidang kegiatan Manajemen Proyek sebanyak 150 kasus atau 20,6% paling dominan terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 71 kasus atau sebesar 47,3%. dan terendah di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1 kasus (0,7%) sedangkan Provinsi Jambi tidak ada pengaduan terkait manajemen proyek. Bidang kegiatan partisipasi masyarakat paling dominan terjadi pada Provinsi Aceh sebanyak 76 kasus (18,2%) dan terendah di Provinsi Jambi sebanyak 1 kasus (0,2%).

Sedangkan bidang kegiatan yang melibatkan partisipasi pemda sebanyak 100 kasus atau 13,7% dari total pengaduan, jumlah paling tinggi terdapat di paling dominan terjadi pada Provinsi Aceh sebanyak 34 kasus (34%) dan terendah di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat masing-masing sebanyak 1 kasus (1%), Sedangkan Jambi dan Kalimantan Utara tidak ada pengaduan partisipasi pemda. Pada pelaksanaan pengawasan dari 62 kasus, yang tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Utara masing-masing sebanyak 11 kasus (22,4%).Sementara Provinsi Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau tidak ada pengaduan partisipasi pemda (0%).

Grafik 5. Pengaduan Berdasarkan Bidang Kegiatan

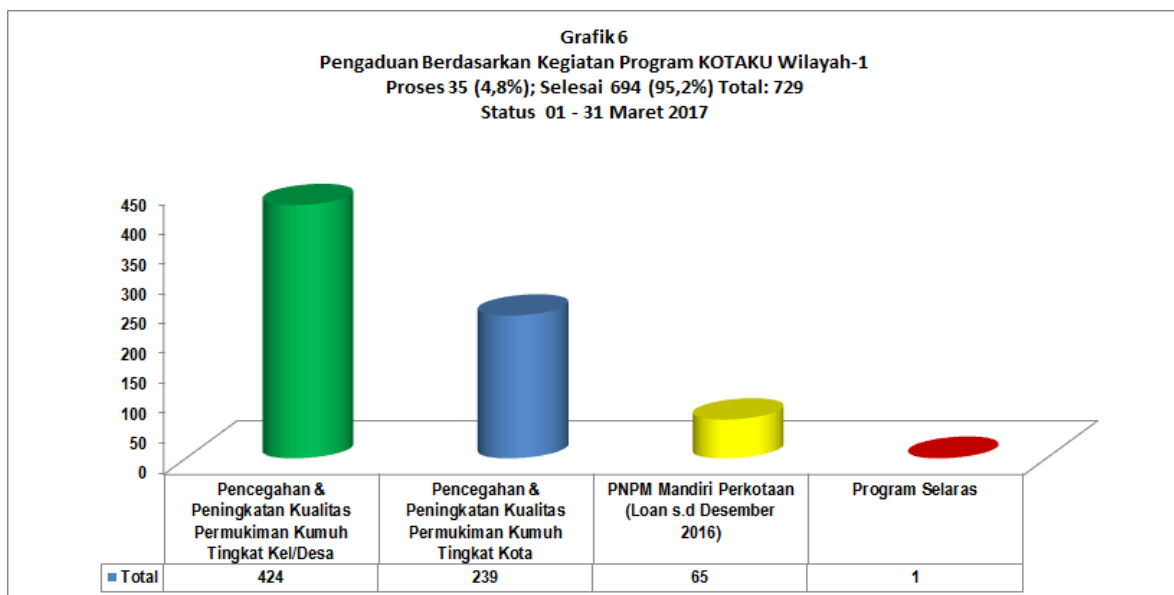


Pengaduan berdasarkan Program kegiatan

Pada periode bulan Maret 2017, pengaduan yang berkaitan dengan program kegiatan berdasarkan skala tingkat kelurahan lebih tinggi sebanyak 424 aduan (58,2%). Pengaduan yang berkaitan dengan program kegiatan berdasarkan skala tingkat kota/kabupaten mencapai 239 pengaduan atau sebesar 32,8%. Sementara pengaduan yang berkaitan dengan program KOTAKU Eks. Kegiatan Program PNPM Mandiri Perkotaan 65 kasus (8,9%) dan Program Selaras Aceh sebanyak 1 pengaduan atau 0,1%

Pengaduan terkait program kegiatan skala tingkat kelurahan tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta masing-masing 84 kasus (19,8%) dan yang terendah terdapat di Provinsi Jambi sebanyak 1 kasus (0,2%).

Grafik 6. Pengaduan Berdasarkan Program



Berdasarkan skala kota yang tertinggi terdapat di Provinsi tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta masing-masing 85 kasus (35,6%) dan yang terendah terdapat di Provinsi Jambi sebanyak 1 kasus atau 0,4%. Sedangkan berdasarkan Eks. Kegiatan Program PNPM Mandiri Perkotaan dari total 65 pengaduan, pengaduan tertinggi di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 18 kasus (27,7%) dan di Provinsi Jambi Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat tidak ada pengaduan ek PNPM Mandiri Perkotaan.

Isi Pengaduan Dominan

Pengelolaan pengaduan pada bulan Maret 2017 yang mencapai 729 pengaduan, apabila dilihat dari isi pengaduan dari segi kategori, derajat maupun sumber pengaduan, maka diperoleh 5 topik pengaduan terbanyak yaitu :

- 1) Penyusunan&DokumenPerencanaan RPLP/RTPLP/NUAP/RKM, 113 kasus atau 15,5 %.
- 2) PelaksanaanKegiatanInfrastrukturSkalaLingkungan/PLPBK Lanjutan, 57 kasus (7,8%)
- 3) Audit Keuangan dan PelaksanaanKegiatanSkalaKel/Desaoleh KAP, 56 kasus atau 67,7%.
- 4) PenetapanPaguAlokasi BDI, sebanyak 55 kasus atau 7,5%
- 5) PelaksanaanKegiatan PPMK; P2B; RLF/Dana Bergulir, 45 kasus atau 6,2%.